

 GEMAH RIPA'AH LOH JINAWI Pemerintah Daerah Kota Cirebon Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu		Nomor SOP	000.8.3.3/017-PLPM/2025
		Tanggal Pembuatan	6 April 2022
		Tanggal Revisi	5 Agustus 2025
		Tanggal Efektif	5 Agustus 2025
		Disahkan oleh	 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon <u>ICH SURYADI, S. Sos. MM.</u> NIP. 197601194995031003
Bidang Pelayanan Penanaman Modal		Nama SOP :	PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	1. Memahami Prosedur Perizinan Berusaha	
2	Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	2. Dapat mengoperasikan Komputer;	
3	Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	3. Mengetahui peraturan perundang undangan	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	4. Mampu berbahasa inggris pasif	
5	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	5. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan publik	
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur diLingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
7	Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah		
8	Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu		
9	Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031		
10	Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rincian Urusan Pemerintah Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon		
11	Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon		
12	Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung		
13	Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
14	Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon		
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
SOP Sertifikat Laik Fungsi (SLF)		1. Komputer	
SOP Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)		2. Printer	
SOP Pengawasan dan Pengendalian pada DPMPSTP Kota Cirebon		3. Ruang Tunggu Tamu	
SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Resiko Menengah Rendah		4. ATK	
SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Resiko Menengah Tinggi		5. Perlengkapan Lain - lain	
SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Resiko Tinggi			
Peringatan		Peralatan & Pendataan	
1. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka Pelayanan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		1. Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)	
2. Apabila jaringan tidak stabil maka pelayanan perizinan terhambat		2. Tanda Bukti Lunas Pembayaran Retribusi	
3. Apabila aplikasi SIMB lemot/eror maka pelayanan terhambat.		3. Sertifikat Izin	
		4. Bukti pengambilan izin	
		5. Data Lainnya	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)**

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket.
		Dinas Teknis / DPUTR	Pemohon	Operator	Pengawas	Kepala Dinas DPMTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menerbitkan dan mengirimkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)						Data SKRD dari DPUTR	Tergantung DPUTR	SKRD	
2	Melakukan validasi SKRD dan menyerahkan ke Pemohon						SKRD	60 Menit	SKRD yang sudah divalidasi	
3	Pemohon membayar retribusi ke Kas Daerah melalui Bendahara penerima Dinas Teknis (DPUTR) dan mengunggah bukti lunas pembayaran retribusi melalui SIMBG						SKRD yang sudah divalidasi	Tergantung Pemohon	Bukti Lunas Bayar Retribusi dan upload bukti bayar	
4	Menerima bukti lunas pembayaran retribusi dari pemohon						Bukti bayar retribusi	60	bukti bayar retribusi yang sudah tervalidasi dan dokumen kelengkapan PBG	
5	Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)						bukti bayar retribusi yang sudah tervalidasi dan dokumen kelengkapan PBG	60	Permohonan PBG tervalidasi dan cetak dokumen PBG	
6	Melakukan pengarsipan dokumen PBG dan penyerahan dokumen PBG kepada Pemohon						Permohonan PBG siap cetak dan dilakukan pengarsipan	30	Dokumen PBG	
7	Mencetak Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)						Dokumen PBG	Tergantung Pemohon	Pemohon melakukan pencetakan secara mandiri	

Ph. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIREBON

KIP SURYADI S. Sos. MM
NIP. 19700119 199502 1 003